



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
JL. TANJUNG API NO. 7 PALU 94112 TELP. (0451) 421954**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Sulawesi Tengah mempunyai arti strategis karena Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Palu, 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 19680217 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2022	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	18
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	22
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	24
3.4 Rencana Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	41
BAB V PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	29
Tabel 2.2	Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah	18
Tabel 3.1	Telaah Tujuan/Sasaran K/L	21
Tabel 3.2	Telaah Visi dan Misi KDH/WKDH	24
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	25
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pohon Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	29
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat seluruh program dan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah secara terinci dan terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penekanannya adalah pada sesuatu yang akan diraih atau diperoleh pada akhir tahun anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai konsekuensi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka seluruh program dan kegiatan dalam Perangkat Daerah akan mengacu dan berpedoman pada Peraturan dimaksud.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah, disusun kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional serta bagaimana pengorganisasian Program dan Kegiatan Pelayanan PD sesuai dengan Tupoksinya.

Selanjutnya Renja Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp

- Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023. Sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, maka sepenuhnya program dan kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada satu tahun kedepan. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan daerah jangka pendek (satu tahun) sebagai penjabaran tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022, sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan target capaian sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 bertujuan :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024, guna Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan yang Akuntabel;

- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022.

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan rancangan awal RKPD tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menggambarkan telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

BAB IV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berpedoman pada Rencana Strategis yang ditetapkan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian antara lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanan Rencana Kerja Tahun 2022

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Daerah Sulawesi Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul, dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2023.

Terkait dengan fungsi pelayanan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2022 boleh dibilang memuaskan. Hal itu bisa dilihat dari rata-rata kumulatif pencapaian pada tahun 2022 rata-rata program dan indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil memuaskan, dengan capaian berkisar 90 sampai dengan 100 %.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan. Sementara itu indikator kinerja berupa benefit dan impact tidak digunakan karena pengukurannya memerlukan penelitian lebih mendalam. Untuk pengukuran kinerja tingkat sasaran dituangkan dalam formulir pencapaian kinerja kegiatan (PKK), sedangkan untuk pengukuran kinerja sasaran dimuat dalam formulir pengukuran pencapaian sasaran (PPS). Capaian Indikator Program Tahun 2022.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 telah melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan yang didukung oleh APBD Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 21.039.339.772,- dengan rincian:

Belanja Operasi

- Belanja Pegawai : Rp. 6.326.865.376,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 5.471.688.263,-
- Belanja Hibah : Rp. 8.977.093.200,-

Belanja Modal

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 263.692.933,-

Dialokasikan untuk pelaksanaan 6 program, 13 kegiatan dan 63 sub kegiatan yang meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 17.154.389.389,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94,20 %.

Realisasi dari anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program-program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan alokasi anggaran Rp. 8.936.182.134,- yang meliputi :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp. 140.571.000,- anggaran yang

- terserap Rp. 134.764.000,- atau terealisasi sebesar 95,87 %.
- Capaian kinerja yang dihasilkan :
- Dokumen Perencanaan;
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
- b. Administrasi Keuangan dan Administrasi Barang pada Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp. 7.567.548.047,- dengan anggaran yang terserap Rp. 6.608.688.676,- atau terealisasi sebesar 87,33 %. Capaian kinerja yang dihasilkan :
- Dokumen Realisasi Anggaran;
 - Persentase Realisasi Anggaran;
 - Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah, alokasi Rp. 1.228.063.087,- dengan anggaran yang terserap Rp. 1.220.702.562,- atau terealisasi sebesar 99,40 %. Capaian kinerja yang dihasilkan :
- Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian;
 - Laporan penyediaan barang dan jasa;
2. Program Pembinaan Wawasan Ketahanan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran Rp. 408.757.800,- dengan anggaran yang terserap Rp. 401.877.800,- atau terealisasi sebesar 98,32 %. Capaian Kinerja yang dihasilkan :
- Dokumen Kegiatan Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan;
 - Pembinaan/Sosialisasi Wawasan Kebangsaan;
 - Pembinaan dan Penguatan FPK.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, dengan alokasi anggaran Rp. 2.184.651.175,- dengan anggaran yang terserap Rp. 2.161.848.575,- atau terealisasi sebesar 98,96 %. Capaian Kinerja yang dihasilkan :
- Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik;
 - Pembinaan/Sosialisasi Pendidikan, Etika dan Budaya Politik;
 - Laporan Batuan Hibah Keuangan Partai Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat, dengan alokasi anggaran Rp. 5.823.320.775,-

dengangan anggaran yang terserap Rp. 5.802.793.379,- atau terealisasi sebesar 99,65 %. Capaian Kinerja yang dihasilkan :

- Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas.LSM;
- Jumlah Ormas/LSM terdaftar;
- Pembinaan/Sosialisasi Ormas/LSM;
- Laporan Bantuan Hibah Ormas/LSM.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan alokasi anggaran Rp. 208.630.850,- dengangan anggaran yang terserap Rp. 208.903.947,- atau terealisasi sebesar 98,69 %. Capaian Kinerja yang dihasilkan :

- Dokumen Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan alokasi anggaran Rp. 649.913.750,- dengangan anggaran yang terserap Rp. 617.810.450,- atau terealisasi sebesar 95,06 %. Capaian Kinerja yang dihasilkan :

- Dokumen Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik;
- Sosialisasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- Rapat Koordinasi Penanganan Konflik.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 didasarkan pada Renstra Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, maka realisasi capaian kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	Indikator	Satuan	4		5		6	
						3		K	Rp	K	Rp	K	Rp
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				21.039.339.772		19.561.456.556		92,98
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	64,50	9.221.995.122		8.145.647.056		88,33
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	184.450.875		179.169.195	-	97,14
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	8.590.650	3	8.167.275	100,00	95,07
8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.128.575	1	5.056.595	100,00	98,60
8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.478.575	1	3.478.575	100,00	100,00
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	20.976.750	1	20.597.425	100,00	98,19
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	146.276.325	1	141.869.325	100,00	96,99
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	97,50	7.470.787.851	85,88	6.416.150.215	88,09	85,88
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	1	6.239.985.376	1	5.185.691.160	100,00	83,10
8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1.165.896.000	1	1.165.896.000	100,00	100,00
8	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	54.548.000	1	54.337.242	100,00	99,61
8	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	7.164.900	2	7.046.388	100,00	98,35
8	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	3.193.575	1	3.179.425	100,00	99,56
8	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	74.788.150	2	72.228.178	100,00	96,58
8	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1	56.444.575	1	53.956.583	100,00	95,59

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022		
1					2	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					3	4		5		6			
						pada SKPD							
8	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	18.343.575	1	18.271.595	100,00	99,61
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	32.729.500	-	32.729.500	-	100,00
8	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	32.729.500	1	32.729.500	100,00	100,00
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Dokumen	6	398.713.988	6	394.407.607	100,00	98,92
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	6.799.038	1	6.788.543	100,00	99,85
8	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	17.258.500	1	17.071.207	100,00	98,91
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	60.280.950	1	60.251.613	100,00	99,95
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan	1	19.320.000	1	17.850.000	100,00	92,39
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	24.500.000	1	24.500.000	100,00	100,00
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	270.555.500	1	267.946.244	100,00	99,04
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	463.692.933	2	457.280.310	200,00	98,62
8	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	35.750.000	1	34.600.000	#DIV/0!	96,78
8	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	227.942.933	36	225.936.695	720,00	99,12
8	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	200.000.000	1	196.743.615	#DIV/0!	98,37
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	228.651.825	2	225.770.047	100,00	98,74
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	92.062.000	1	89.351.060	100,00	97,06
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	136.589.825	1	136.418.987	100,00	99,87
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	368.180.000	3	367.912.004	100,00	99,93
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit	33	319.600.000	33	319.587.004	100,00	100,00

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022			
1				2	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3	4		5		6				
				Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya								
8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	40	27.580.000	40	27.400.000	100,00	99,35
8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	21.000.000	1	20.925.000	100,00	99,64
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	%	20	2.621.881.925	36,88	2.599.695.916	184,38	99,15
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Dokumen	5	2.621.881.925	5	2.599.695.916	100,00	99,15
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Laporan	1	3.049.000	1	3.024.291	100,00	99,19
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Laporan	1	5.549.000	1	5.548.999	100,00	100,00
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Orang	40	1.855.205.450	125	1.854.467.809	312,50	99,96
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Orang	120	308.467.750	170	304.843.702	141,67	98,83

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022		
1					2	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					3	4		5		6			
					Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	4	449.610.725	4	431.811.115	100,00	96,04
8	01				PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	20	508.294.575	28,00	497.167.280	140,00	97,81
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	5	508.294.575	5	497.167.280	100,00	97,81
8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Laporan	1	3.365.500	1	3.093.460	100,00	91,92
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Laporan	1	6.376.000	1	6.375.985	100,00	100,00
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	100	174.043.525	230	173.465.578	230,00	99,67
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	150	136.013.050	120	134.093.727	80,00	98,59
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4	188.496.500	4	180.138.530	100,00	95,57
8	01	04			PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/Anggota Ormas di Sulawesi Tengah yang mendapat Pemberdayaan dan Sosialisasi Keormasan	%	20	7.767.082.500	46,67	7.416.313.072	233,33	95,48

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022			
1				2	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3	4		5		6				
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	5	7.767.082.500	5	7.416.313.072	100,00	95,48
8	01	04	1.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Laporan	1	3.324.000	1	3.095.213	100,00	93,12
8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Laporan	1	3.010.500	1	2.777.180	100,00	92,25
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	60	7.330.749.900	75	7.016.330.725	125,00	95,71
8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	60	237.301.375	205	225.770.892	341,67	95,14
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4	192.696.725	4	168.339.062	100,00	87,36
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	20	338.480.725	30	336.977.064	150,00	99,56
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	5	338.480.725	5	336.977.064	100,00	99,56
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Laporan	1	2.892.800	1	2.638.680	100,00	91,22
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Laporan	1	3.038.000	1	2.804.280	100,00	92,31

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022		
1					2	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					3	4		5		6			
					dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun							
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	60	72.583.950	120	72.530.600	200,00	99,93
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	60	63.575.875	60	62.706.629	100,00	98,63
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	196.390.100	4	196.296.875	100,00	99,95
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Kewaspadaan Dini di Daerah	%	20	581.604.925	24	565.656.168	119,64	97,26
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah	Dokumen	5	581.604.925	5	565.656.168	100,00	97,26
8	01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	4.533.900	1	4.403.852	100,00	97,13
8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Laporan	4	22.333.700	4	22.197.379	100,00	99,39
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan	Orang	130	106.393.725	135	103.283.809	103,85	97,08

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022		
1					2	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					3	4		5		6			
					Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150	144.859.975	200	140.758.829	133,33	97,17
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	4	194.615.450	4	186.349.809	100,00	95,75
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Laporan	4	108.868.175	4	108.662.490	100,00	99,81

Dari tabel di atas dapat disampaikan faktor-faktor yang menyebabkan terpecahnya target kinerja pada program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Keberhasilan program ini dihasilkan dari elemen masyarakat yang memiliki kepedulian dan konsentrasi pada pbumian dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Strategi kerjasama ini menghasilkan pelaksanaan kegiatan lebih banyak dan cakupan yang lebih luas, walaupun dengan minimnya ketersediaan anggaran.
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik untuk membangun Pendidikan Politik, Penatausahaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Kegiatan Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat, Kegiatan FGD Penguatan Budaya Dan Etika Politik Masyarakat.
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dikemas sosialisasi yang melibatkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat telah berjalan efektif. Edukasi dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup rukun dengan saling toleransi antar maupun antar agama, suku, etnis, membangun kebersamaan, solidaritas. Ormas yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai indikator maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Edukasi dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mengenai ketahanan ekonomi di daerah dan mengantisipasi terjadinya gejolak ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi, mengembangkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan daya saing produk unggulan

daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemecahan masalah dengan melalui mufakat *mandicat*, yang saling mempercayai dan saling terbuka untuk menyelesaikan konflik *mandica* yang terjadi. Selain dengan keterlibatan masyarakat, penguatan Tim Terpadu dalam penanganan konflik *mandica* dan kerjasama melalui Tim Kewaspadaan Dini serta koordinasi antara instansi terkait melalui Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah perlu dikuatkan lagi untuk mencegah dan menangani konflik *mandica* yang terjadi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat madani di bidang pemahaman dan kemampuan komponen masyarakat dalam menjaga dan membangun ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi di Sulawesi Tengah, terutama dikalangan Ormas/LSM, Tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda di Sulawesi Tengah.
2. Terselenggaranya Pengembangan Ideologi Bangsa Dan Wawasan Kebangsaan untuk mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Sulawesi Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas untuk menanamkan nilai-nilai budaya luhur demi terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Sulawesi Tengah dalam keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, dan penanaman nilai-nilai tersebut akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara demi NKRI.
3. Meningkatkan fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik bagi Parpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Aparatur yang telah memahami pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggung Sulawesib. Hal ini mengandung pengertian bahwa

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai indikator teknis Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, memiliki tugas untuk menyelenggarakan mediasi, fasilitasi, dan komunikasi bagi institusi masyarakat serta masyarakat itu sendiri untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai betapa pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggungjawab.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam dalam Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

Tabel 2.2.
Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	NAMA IKU DAN IKK	TARGET IKU DAN IKK	SATUAN INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2022	REALISASI RENSTR 2022	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	20% (770 Orang)	29,74 % (1.145 Orang)	Target 3.850 Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Kegiatan Badan Kesbangpol
2	Meningkatnya Pendidikan, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	76,50	-	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2022 Belum di Keluarkan dari BPS

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan kondisi indikator politik, budaya, ekonomi, agama dan juga situasi keamanan yang terus mengalami dinamika. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah akan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk melakukan upaya deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpotensi mengganggu kelancaran Pemerintahan di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Sulawesi Tengah dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

- a. Kesenjangan sosial ekonomi.
- b. Belum maksimalnya pendidikan politik dimasyarakat
- c. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat belum berperan secara maksimal.
- d. Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda dan Tokoh Perempuan belum berperan secara maksimal dalam mencegah dan menyelesaikan konflik \square ndica.
- e. Kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan.
- f. Masyarakat masih rentan terhadap isu-isu yang berpotensi konflik.
- g. Penyelesaian masalah masih sering diselesaikan dengan jalan aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis.
- h. Masih adanya gangguan kerawanan oleh pelaku aksi teror.
- i. Masih sering terjadi Konflik batas wilayah dan bentrokan antarwarga, antarpemuda dan antardesa.

2.4. Reviu Rancangan Awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 telah tersusun 6 (enam) program yang terjabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan , sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan:

9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, dengan kegiatan:
 10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan:
 11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dengan kegiatan:
 12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan:
 13. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebijakan				
				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
8	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sulawesi Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	15.184.500.285	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sulawesi Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	15.184.500.285
8	1	2		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Sulawesi Tengah	Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	40	344.430.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Sulawesi Tengah	Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	40	344.430.000
8	1	3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Sulawesi Tengah	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	40	1.390.360.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Sulawesi Tengah	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	40	1.390.360.000
8	1	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Sulawesi Tengah	Persentase Peningkatan jumlah Ormas yang disetujui pendaftarannya pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	100	247.300.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Sulawesi Tengah	Persentase Peningkatan jumlah Ormas yang disetujui pendaftarannya pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	100	247.300.000
8	1	5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Sulawesi Tengah	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	40	219.330.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Sulawesi Tengah	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	40	219.330.000
8	1	6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Sulawesi Tengah	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Masyarakat dalam upaya Pencegahan Konflik Sosial di Daerah	40	356.810.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Sulawesi Tengah	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Masyarakat dalam upaya Pencegahan Konflik Sosial di Daerah	40	356.810.000
TOTAL								17.742.730.285					17.742.730.285

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Di samping memastikan sinkronisasi dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan Visi dan Misi Presiden. Visi Misi Presiden dijabarkan oleh Kementerian/Lembaga yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, untuk itu sangat perlu memperhatikan Permendagri No. 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024.

Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tujuan strategis, yaitu Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa, keterkaitan Pencapaian Tujuan dan Sasaran dengan kebutuhan Kelembagaan.

Tabel 3.1
Telaah Tujuan/Sasaran K/L

Tujuan : “Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa”				
No	Sasaran K/L	Tupoksi PD	Faktor	
			Pengdorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia	1. Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik	1 Adanya UU no. 23 Thn 2014 psl 25 dan 26 mengamanatkan penyusunan PP ttg pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Masyarakat yang tidak ambil pusing (masa bodoh) dengan Kegiatan Perpolitikan
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2. Adanya PP no. 18 Thn 2016 ttg perangkat daerah yg dlm ketentuan peralihan pasal 122 diatur masa transisi kesbangpol tetap melaksanakan tugasnya dan dibiayai APBD	2. Rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap ancaman disintegrasi Bangsa
3	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	3. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3. Adanya Permendagri no. 38 Thn 2018 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2018 yg merupakan dasar pelaksanaan dan penganggaran program keg Bid. Kesatuan Bangsa dan Politik	3. Masih adanya isu SARA □ndi berpotensi Konflik
		4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, □ndica dan budaya	4. Adanya Surat edaran Mendagri Tgl. 30 Okt 2017 no. 050.12/7765/SJ ttg penyusunan program bid. Kesatuan bangsa dan politik dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang Nilai-Nilai sejarah Kebangsaan
		5. Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	5. Adanya Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Kepmendagri Nomor 100 – 440 dan 100 – 441 Tahun 2019	5. Belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan Ormas dan LSM

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Visi dan Misinya selama lima tahun ke depan (2021-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah : **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan kedalam Sembilan (9) Misi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan Maupun di Dalam Provinsi Sulteng dan di Luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan Secara Sistimatis dan Digital.
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar Terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Dari misi yang tertuang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah secara langsung dan tidak langsung mendukung semua misi yang tercantum, terutama pada Misi Kedua : **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM”**. Sebagai bahan Telaahan terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan identifikasi beberapa

permasalahan, beserta indikator penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi KDH/WKDH

Visi : "Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"					
No	Misi/ KDH/WKDH	Tupoksi PD	Faktor		
			Pendorong		Penghambat
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)
	"Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM"	1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	Adanya UU no. 23 Thn 2014 psl 25 dan 26 mengamanatkan penyusunan PP ttg pelaksanaan urusan pemerintahan umum (30 Mei 2016 di tunda pelaksanaannya)	1. Rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap ancaman disintegrasi Bangsa
		2. Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.	Adanya PP no. 18 Thn 2016 ttg perangkat daerah yg dlm ketentuan peralihan pasal 122 diatur masa transisi kesbangpol tetap melaksanakan tugasnya dan dibiayai APBD	2. Masyarakat yang tidak ambil pusing (masa bodoh) dengan Kegiatan Perpolitikan
		3. Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	3.	Adanya Permendagri no. 38 Thn 2018 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2018 yg merupakan dasar pelaksanaan dan penganggaran program keg Bid. Kesatuan Bangsa dan Politik	3. Belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan Ormas dan LSM
		4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, indikator dan budaya	4.	Adanya Surat edaran Mendagri Tgl. 30 Okt 2017 no. 050.12/7765/SJ ttg penyusunan program bid. Kesatuan bangsa dan politik dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang Nilai-Nilai sejarah Kebangsaan
		5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5.	Adanya Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 100 – 440 dan 100 – 441 Tahun 2019	5. Masih adanya isu SARA yg berpotensi Konflik

Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah telah menetapkan program dan kegiatan yang akan dicapai dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2023. Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan isu – isu strategis yang harus ditindak lanjuti sebagai upaya untuk memberikan dukungan dan indikator – indikator solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi program merupakan indikator kebijakan yang terdiri dari satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Dengan berlandaskan Misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan : **“Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoleksosbud)”**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan ndic pada penyusunan Program dan Kegiatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah beserta ndicator kinerjanya dapat dijelaskan dalam ndic 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoleksosbud)		Persentase Masyarakat yang Paham Wawasan Kebangsaan	Persentase	20	40	60	80	100
	- Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	20	40	60	80	100
	- Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	76,50	76,80	77,10	77,15	77,20

3.4 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam Renja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun terdapat 6 (enam) Program, sebagaimana berikut :

3.4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator kinerja program atau outcome adalah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan kegiatan dan output atau Indikator Kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan PertanggungSulawesian Keuangan.

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah.

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.

- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.

3.4.2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, serta dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- Indikator keluaran dan kegiatan ini adalah Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

3.4.3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik.

3.4.4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Peningkatan jumlah Ormas yang disetujui pendaftarannya pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

3.4.5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

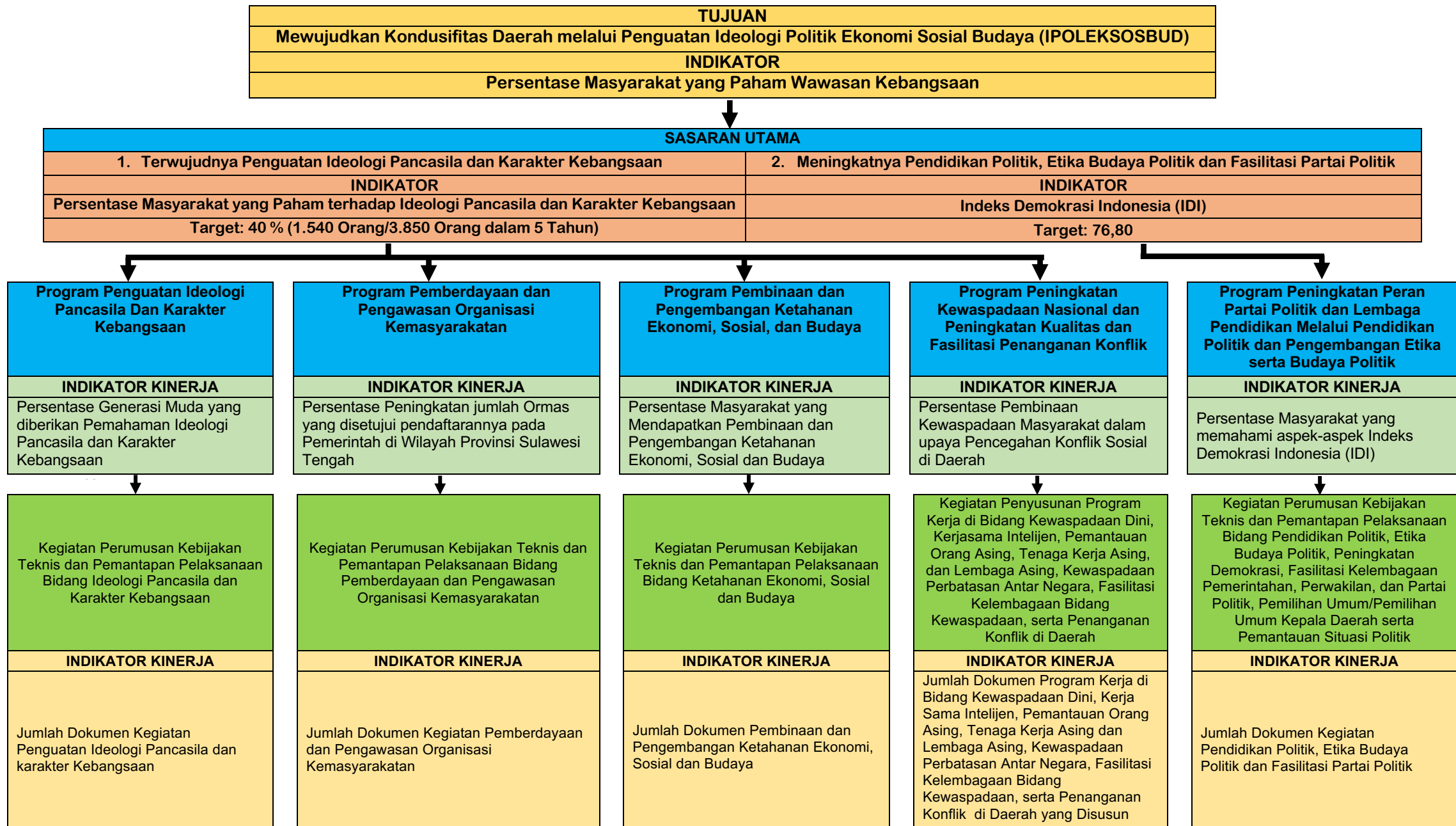
3.4.6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Pembinaan Kewaspadaan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Konflik Sosial di Daerah, serta dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut:

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- Indikator keluaran dan kegiatan ini adalah Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

Dalam penentuan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, disusun Cascading (pohon kinerja) yang merupakan sebuah proses penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, serta tujuan dan sasaran pembangunan kedalam Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah dengan menggunakan kerangka logis sehingga menjadi lebih rinci dan terbagi habis. Dengan kata lain adanya Cascading tersebut, tumpeng tindih tugas dan kewenangan pada setiap jenjang jabatan dapat dihindari. Adapun Cascading Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah disajikan pada gambar dibawah ini:

**POHON KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Gambar 3.1
Pohon Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

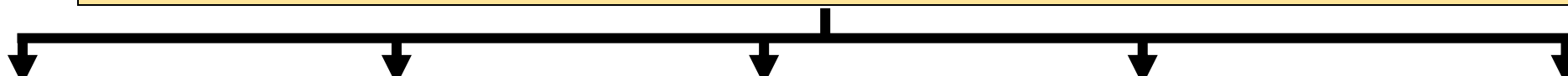
SASARAN UTAMA
Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Target : 40 % (1.540 Orang/3.850 Orang dalam 5 Tahun)



Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Target : 40 % (500 orang/1.250 orang dalam 5 Tahun)



Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Target : 5 Dokumen



Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun
Target : 1 Dokumen

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Target : 100 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Target : 150 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Target : 4 Laporan

Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Target : 1 Dokumen

SASARAN UTAMA
Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
1. Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Target : 40 % (1.540 Orang/3.850 Orang dalam 5 Tahun)



Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
INDIKATOR KINERJA
Persentase Peningkatan jumlah Ormas yang disetujui pendaftarannya pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
Target : 100 %



Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Target : 4 Dokumen



Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun
Target : 1 Dokumen

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Target : 60 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Target : 60 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Target : 4 Laporan

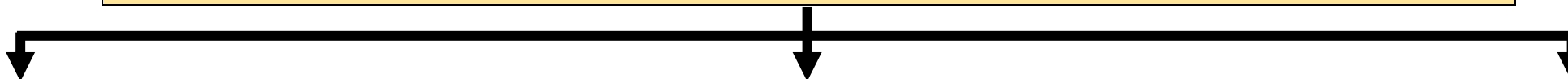
SASARAN UTAMA
Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Target : 40 % (1.540 Orang/3.850 Orang dalam 5 Tahun)



Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
INDIKATOR KINERJA
Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Target : 40 Persen (240 Orang/600 Orang dalam 5 Tahun)



Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Target : 3 Dokumen



Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Target : 60 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Target : 60 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Target : 4 Laporan

SASARAN UTAMA
Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
1. Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Target : 40 % (1.540 Orang/3.850 Orang dalam 5 Tahun)

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik
INDIKATOR KINERJA
Persentase Pembinaan Kewaspadaan Masyarakat dalam upaya Pencegahan Konflik Sosial di Daerah
Target : 40 Persen (560 Orang/1.400 Orang dalam 5 Tahun)

Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
Target : 5 Dokumen



SASARAN UTAMA
Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik
INDIKATOR KINERJA
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Target : 40 % (320 Orang/800 Orang dalam 5 Tahun)



Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
INDIKATOR KINERJA
Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)



Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik
Target: 4 Dokumen



Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
Target : 1 Dokumen

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Target : 40 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Target : 120 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Target : 4 Laporan

Dukungan Sekretariat dalam “Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (IPOLEKSOSBUD)”

SASARAN 1	SASARAN 2	SASARAN 3
Terpenuhinya Kebutuhan Pendukung Perencanaan	Meningkatnya Tata Usaha OPD Kesbang yang Berkualitas	Meningkatnya Tata Kelola OPD yang Berkualitas
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Meningkatnya Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Badan Kesbangpol Kabupaten Lahat yang Berkualitas	Meningkatnya Penyelenggaraan Keuangan dan Pelayanan Administratif Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administratif Kepegawaian yang berkualitas

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Indeks Kepuasan Masyarakat
Target : 75	Target : 97,50 %	Target : 85
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Target : 3 Dokumen	Target : 12 Bulan	Target : 1 Paket
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
Target : 1 Dokumen	Target : 1 Dokumen	Target : 1 Dokumen

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
INDIKATOR
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Target : 1 Dokumen
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
INDIKATOR
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Target : 1 Dokumen
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
INDIKATOR
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Target : 1 Dokumen
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
INDIKATOR
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target : 1 Laporan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
INDIKATOR
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Target : 1 Dokumen
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
INDIKATOR
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Target : 1 Dokumen
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Target : 1 Dokumen
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
INDIKATOR
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Target : 1 Dokumen

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
INDIKATOR
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Target : 1 Orang
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
INDIKATOR
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Target : 1 Orang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa
Target : 6 Dokumen
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
INDIKATOR
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Target : 1 Laporan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Target : 1 Laporan	Target : 1 Laporan	Target : - Laporan
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	INDIKATOR	INDIKATOR
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
	Target : 1 Dokumen	Target : - Paket
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	INDIKATOR	INDIKATOR
	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	Target : 4 Laporan	Target : - Laporan
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	INDIKATOR	INDIKATOR
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Target : 1 Dokumen	Target : 1 Laporan
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	INDIKATOR	INDIKATOR
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Target : 1 Laporan	Target : 1 Laporan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
INDIKATOR
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Target : 1 Laporan
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
INDIKATOR
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Target : 1 Laporan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
INDIKATOR
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Target : 1 Paket
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
INDIKATOR
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Target : 5 Unit
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
INDIKATOR
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Target : 1 Unit
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target : Laporan
Target : Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target : 1 Laporan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Target : 1 Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Target : 1 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target : 1 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target : 3 Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
INDIKATOR
Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Target : - Unit

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

INDIKATOR

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Target : 33 Unit

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

INDIKATOR

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Target : 40 Unit

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

INDIKATOR

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Target : 1 Unit

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

INDIKATOR

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Target : - Unit

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Sulawesi Tengah melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023, sebagai berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKP D Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	1						17.742.730.285						20.460.370.000						
8	1	1					15.184.500.285						17.354.830.000						
8	1	1	01.01				475.000.000						600.000.000						
8	1	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas	Dokumen Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas	Dokumen Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000	Kota Palu,	PENDAP ATAN	Memperkuat	Penunjang Program	Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	Badan Kesatuan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Palu Timur, Lolu Selatan	ASLI DAERAH (PAD)	Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayanan Publik	prioritas	Perencanaan, Penggang aran dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah			n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
8	1	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas	Dokume n Perencanaan, Penggang aran dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas	Dokume n Perencanaan, Penggang aran dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas	Dokume n Perencanaan, Penggang aran dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	1 Laporan	50.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	350.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecama	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam	Penanggulangan Korban Bencana melalui	Dokume n Perencanaan, Penggang	1 Laporan	450.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								tan, Semua Kelurahan		Dan Transformasi Pelayanan Publik	penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi	aran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
8	1	1	01.02											11.364.830.000		
8	1	1	01.02	1				Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Penunjang Program prioritas	Dokumen Asministrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Orang/ Bulan	8.369.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.1.1.01.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	2.100.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Dokumen Asminist rasi Keuanga n Perangka t Daerah	12 Dokumen	2.780.330.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8.1.1.01.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	15.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Dokumen Asminist rasi Keuanga n Perangka t Daerah	1 Dokumen	15.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8.1.1.01.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	15.000.000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Dokumen Asminist rasi Keuanga n Perangka t Daerah	1 Dokumen	15.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8.1.1.01.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Dokumen Asminist rasi Keuanga n Perangka t Daerah	1 Laporan	150.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8.1.1.01.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan				1 Dokumen	5.000.285	Kota Palu, Palu	PENDAP ATAN ASLI		Penunjang Program prioritas	Dokumen Asminist	1 Dokumen	5.000.000	Badan Kesatua n

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
		Pemeriksaan						Timur, Lolu Selatan	DAERAH (PAD)			rasi Keuanga n Perangka t Daerah			Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
8	1	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Lapo ran	15.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Dokume n Asminist rasi Keuanga n Perangka t Daerah	1 Lapo ran	15.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Doku men	15.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Dokume n Asminist rasi Keuanga n Perangka t Daerah	1 Doku men	15.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						190.000.000							280.000.000	
8	1	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Doku men	15.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas	Laporan Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangka t Daerah	1 Doku men	15.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.	3	Koordinasi dan	Jumlah Laporan Hasil				1 Lapo r		Kota	PENDAP	Memperk	Penunjang	Laporan	1 Lapo ran		Badan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
8	1	1	01.03	5														
8	1	1	01.03	6														
8	1	1	01.05															
8	1	1	01.05	2														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakir aan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.1.1.01.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	15.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8.1.1.01.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Orang	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8.1.1.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Orang	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8.1.1.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						745.000.000							745.000.000	
8.1.1.01.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		15.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakir aan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
																	i Tengah			
8	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	30.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Administ rasi Umum Perangka t Daerah	1 Paket	30.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	100.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Administ rasi Umum Perangka t Daerah	1 Paket	100.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Administ rasi Umum Perangka t Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Administ rasi Umum Perangka t Daerah	1 Laporan	50.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan					1 Laporan	500.000.00	Semua Kab/Ko	PENDAP ATAN		Penunjang Program	Laporan Administ	1 Laporan	500.000.00	Badan Kesatua

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
							0	ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	ASLI DAERAH (PAD)		prioritas	rasi Umum Perangka t Daerah	0	n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		
8	1	1	01.07				1.550.000.000						1.725.000.000			
8	1	1	01.07	1			2 Unit	500.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	2 Unit	500.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.07	6			5 Unit	300.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	5 Unit	300.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.07	9			1 Unit	750.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah	1 Unit	750.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
												Daerah			Sulawes i Tengah				
8	1	1	01.08					475.000.000							475.000.000				
8	1	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	25.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penunjang Program prioritas	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	150.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	250.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	1 Laporan	250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
												ahan Daerah			Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			
8	1	1	01.09				1.550.000.000							1.650.000.000				
8	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	1.000.000.000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33 Unit	1.100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	50.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Unit	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	500.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Unit	500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
											Daerah					
8	1	2					344.430.000						376.990.000			
8	1	2	01.01				344.430.000						376.990.000			
8	1	2	01.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1 Dokumen	3.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	Generasi Muda	1 Dokumen	3.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	2	01.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1 Dokumen	6.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	Generasi Muda	1 Dokumen	6.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	2	01.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi				130.000.000		PENDAP ATAN ASLI	Penunjang Program prioritas	Generasi Muda		135.000.000	Badan Kesatuan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakir aan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
									DAERAH (PAD), V						Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		
8	1	2	01.01	4					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Generasi Muda	150 Orang	145.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
8	1	2	01.01	5					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Generasi Muda	4 Laporan	86.990.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
8	1	3													1.390.360.000	1.627.260.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
					POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
8	1	3	01.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik											1.627.260.000			
8	1	3	01.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun										4.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahun 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8	1	3	01.01	2		1 Dokumen	6.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penunjang Program prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	6.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	3	01.01	3		40 Orang	910.860.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penunjang Program prioritas	Masyarakat	40 Orang	1.136.760.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahun 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
8	1	3	01.01	4			120 Orang	250.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat	120 Orang	255.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	3	01.01	5			4 Laporan	220.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat	4 Laporan	225.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKKPD Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
8	1	4					247.300.000							510.880.000		
8	1	4	01.01				247.300.000							510.880.000		
8	1	4	01.01	1	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Organisa si Masyara kat (Ormas)	1 Dokumen	5.500.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	4	01.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitun gan Anggaran Tahun		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Organisa si Masyara kat (Ormas)	1 Dokumen	5.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakir aan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Sebelum nya						
8	1	4	01.01	3		60 Orang	100.000.000	Semua Kab/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Organisa si Masyara kat (Ormas)	60 Orang	150.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawes i Tengah
8	1	4	01.01	4		60 Orang	80.000.000	Semua Kab/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Organisa si Masyara kat (Ormas)	60 Orang	175.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawes i Tengah
8	1	4	01.01	5		4 Laporan	60.800.000	Semua Kab/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Organisa si Masyara kat (Ormas)	4 Laporan	175.380.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawes i Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8	1	5													
8	1	5	01.01												
8	1	5	01.01	1											
8	1	5	01.01	2											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakir aan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													Sulawes i Tengah	
8	1	5	01.	3			60 Orang	80.000.000	Semua Kab/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	MAsyara kat	60 Orang	80.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawes i Tengah
8	1	5	01.	4			60 Orang	75.000.000	Semua Kab/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	MAsyara kat	60 Orang	80.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawes i Tengah
8	1	5	01.	5			4 Laporan		Semua	PENDAP		Penunjang	MAsyara	4 Laporan		Badan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakir aan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
						an	58.399.200	Kab/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Program prioritas	kat		59.139.200	Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	6					356.810.000							365.340.000	
8	1	6	01.01				356.810.000							365.340.000	
8	1	6	01.01	1		1 Dokumen	2.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Unsur Pemerintah Daerah	1 Dokume n	2.500.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													Provinsi Sulawesi Tengah	
8	1	6	01.01	2			4 Dokumen	20.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyarakat dan Unsur Pemerintah Daerah	4 Dokumen	25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	6	01.01	3			130 Orang	40.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyarakat dan Unsur Pemerintah Daerah	130 Orang	45.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
8	1	6	01.01	4					PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Unsur Pemerint ah Daerah		130.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawes i Tengah	
8	1	6	01.01	5			4 Laporan	140.000.000	Semua Kab/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Unsur Pemerint ah Daerah	4 Laporan	130.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawes i Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Pengang gung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
	Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Daerah																	
8	1	6	01.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				4 Dokumen	34.810.000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Unsur Pemerint ah Daerah	4 Dokume n	32.840.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
TOTAL							17742730285											20.460.370.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen rencana tahunan. Penetapan program dan kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Untuk itu dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2022, masing-masing Bidang dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dan Institusi yang menangani tugas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah berpedoman terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja ini, demi terciptanya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

Penyusunan rencana biaya pelaksanaan program dan kegiatan kiranya mempertimbangkan efisiensi secara rasional dan proporsional. Oleh karena itu perlu disusun prioritas program dan kegiatan sesuai aspek-aspek yang dinilai strategis.

Disamping hal tersebut disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait dengan memperhatikan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan bagi masyarakat dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.